



**ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT**

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026 Halaman 1361-1369

<https://zia-research.com/index.php/abdicendekia>



**Paradigma Mutu dan Akuntabilitas Pendidikan
dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan**

Risma Nata Saputri¹, Yudo Handoko²

^{1,2} Universitas Jambi, Indonesia

Email : rismanatasaputri03@gmail.com¹, yudo@unja.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi paradigma kualitas dan akuntabilitas dalam pendidikan untuk peningkatan berkelanjutan. Kualitas pendidikan dipahami sebagai konsep multidimensi yang mencakup aspek-aspek yang saling terkait: masukan, proses, hasil, dan dampak. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, menggabungkan berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu internal dan eksternal memainkan peran penting dalam memastikan pencapaian standar pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan. Lebih lanjut, akreditasi dan implementasi standar nasional dan internasional berfungsi sebagai alat strategis untuk menilai dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Penggunaan pendekatan pendidikan berbasis hasil (*Outcome-Based Education/OBE*) juga terbukti efektif dalam mempersiapkan lulusan yang kompeten yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan berdaya saing global. Secara keseluruhan, kombinasi penjaminan mutu, akreditasi, standar pendidikan, dan OBE memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan sosial. Oleh karena itu, kolaborasi antara semua pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan berkualitas tinggi yang responsif terhadap perubahan kondisi.

Kata kunci: Akreditasi, Akuntabilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan, *Outcome-Based Education*, Penjaminan Mutu, Standar Pendidikan.

***The Paradigm of Quality and Accountability
of Education in Improving the Quality of Continuing Education***

Abstract

The purpose of this study is to explore the paradigm of quality and accountability in education for continuous improvement. Educational quality is understood as a multidimensional concept encompassing interrelated aspects: input, process, outcomes, and impact. This study employed a literature review method, combining various relevant sources. The results indicate that internal and external quality assurance systems play a crucial role in ensuring consistent and sustainable achievement of educational standards. Furthermore, accreditation and the implementation of national and international standards serve as strategic tools for assessing and improving the quality of educational institutions. The use of an outcomes-based education (OBE) approach has also proven effective in preparing competent graduates who meet labor market needs and are globally competitive. Overall, the combination of quality assurance, accreditation, educational standards, and OBE has a significant impact on improving the quality of human resources and social progress.

Therefore, collaboration between all stakeholders is necessary to create a high-quality education system that is responsive to changing conditions.

Keywords: *Accreditation, Educational Accountability, Educational Quality, Outcome-Based Education, Quality Assurance, Educational Standards.*

PENDAHULUAN

Mutu merupakan aspek penting bagi setiap lembaga pendidikan, di mana kualitas dianggap sebagai aset terpenting dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus komprehensif dan terintegrasi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana lembaga tersebut mengelola kualitas. Manajemen kualitas, pada intinya, bertujuan untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek operasional lembaga pendidikan. Manajemen kualitas berupaya meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan efisiensi dengan meningkatkan indikator internal dan eksternal. Mutu merupakan aspek penting bagi setiap lembaga pendidikan, di mana kualitas dianggap sebagai aset terpenting dalam lingkungan yang kompetitif. Oleh karena itu, manajemen lembaga pendidikan harus komprehensif dan terintegrasi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana lembaga tersebut mengelola kualitas. Manajemen kualitas, pada intinya, bertujuan untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek operasional lembaga pendidikan. Manajemen kualitas berupaya meningkatkan kualitas kerja, produktivitas, dan efisiensi dengan meningkatkan indikator internal dan eksternal.

Mutu adalah konsep yang terkait erat dengan standar dan tingkat pencapaian di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Secara umum, kualitas dapat dipahami sebagai tingkat keunggulan suatu produk atau layanan, yang diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, kualitas mencerminkan sejauh mana proses pembelajaran dan hasil belajar siswa memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, seperti siswa itu sendiri, masyarakat, dan dunia kerja. Pendidikan berkualitas tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga mencakup pengembangan karakter, keterampilan, dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan demikian, pendidikan berkualitas mencakup berbagai aspek, termasuk intelektual, emosional, dan sosial, yang penting untuk mengembangkan individu yang tidak hanya memiliki kecerdasan akademik tetapi juga kompetensi dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Paradigma pendidikan yang dipromosikan dalam konteks kebutuhan pendidikan multikultural telah mendapat respons positif dari cabang eksekutif dan legislatif pemerintah. Hal ini dikonfirmasi dengan diadopsinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai sistem yang mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan mengejar nilai-nilai multikultural (Bab III, Pasal 4, Ayat 1). Bahkan, nilai-nilai tersebut telah menjadi salah satu prinsip pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pendidikan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam Bab III, Pasal 4, Ayat 1: "Pendidikan diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan serta tidak diskriminatif, dengan prioritas diberikan kepada hak asasi manusia, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan keberagaman nasional" (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Pendidikan dijalani oleh berbagai komunitas dari berbagai latar belakang, yang berarti pendidikan perlu memiliki fondasi yang kuat yang dapat mencakup dan menyatukan semua aspek keberagaman, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan tidak menimbulkan konflik antar peserta didik. Dede Rosyada (Rosyada, 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan membutuhkan kurikulum. Oleh karena itu, nilai-nilai multikultural harus menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum di setiap lembaga pendidikan, baik umum maupun khusus, seperti sekolah, madrasah, dan sekolah berasrama.

METODE

Metode dan jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (Assingkily, 2021) dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung tema penelitian (Bagenda et al, 2022), di antaranya literatur tentang manajemen mutu, penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Proses penelitian ini dimulai dengan tahapan sebagai berikut: mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema penjaminan mutu, kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan penjaminan mutu pada lembaga pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mutu Pendidikan

Menurut KBBI, mutu mengacu pada kualitas, tingkat, ukuran, atau derajat sesuatu (Poerwadarminta, 1999). Dalam konteks pendidikan, kualitas ini mencakup aspek input, proses, output, dan outcome secara menyeluruh. Rusman (2018) menegaskan bahwa sekolah harus terlebih dahulu menentukan kualitas output dan mendefinisikan tujuan tahunan secara jelas, karena hasil dari proses pendidikan yang berkualitas merupakan elemen-elemen yang saling berhubungan. Sementara itu, Hari Sudrajat (2005) meyakini pendidikan berkualitas sebagai upaya mempersiapkan lulusan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan hidup, yang dibentuk berdasarkan kemampuan pribadi, sosial, serta nilai-nilai moral yang tinggi guna membentuk kemampuan kompleks yang menggabungkan keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

Peningkatan kualitas pendidikan menurut Sudarvan Danim (2008) membutuhkan partisipasi aktif dari lima faktor kunci, yaitu guru, kompetensi kepala sekolah, kurikulum, siswa, dan jaringan. Hal ini didukung oleh tiga belas karakteristik kualitas yang meliputi efisiensi, waktu belajar, keandalan, daya tahan, estetika, interaksi pribadi, kemudahan penggunaan, fungsionalitas, kesesuaian dengan spesifikasi, hingga konsistensi. Secara teoritis, Philip B. Crosby menekankan mutu sebagai kesesuaian dengan standar yang diukur melalui kualitas bahan baku dan efisiensi proses, sedangkan Joseph Juran mendefinisikannya sebagai kesesuaian untuk digunakan, yang menjamin keamanan dan efektivitas produk sesuai tujuannya.

Secara regulasi, mutu pendidikan di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar ini mencakup SKL, standar isi, proses, pendidik, sarana, hingga sistem akreditasi oleh BNSP dan LPMP. Mutu pendidikan dibangun di atas fondasi input pendidikan yang merupakan ekosistem kompleks antara sumber daya manusia dan infrastruktur. Mutu bukanlah hal statis, melainkan konsep dinamis yang menuntut evaluasi berkelanjutan berbasis pengalaman pengguna untuk meningkatkan kepuasan, efisiensi, dan daya saing.

Aminatul Zahroh berpendapat bahwa pendidikan berkualitas adalah kompetensi lembaga dalam mengelola sumber daya guna memaksimalkan potensi akademik siswa. Sejalan dengan itu, Marus Suti menekankan bahwa pendidikan berkualitas adalah proses sistematis yang mengelola sumber daya secara bijaksana dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi siswa secara utuh. Fokusnya tidak hanya pada prestasi akademik atau ijazah, tetapi juga pada pengembangan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Pada akhirnya, keberhasilan mutu pendidikan diukur dari kemampuan siswa untuk menerapkan pengetahuan, mengasah keterampilan, dan menunjukkan kualitas pribadi yang baik melalui lingkungan belajar yang aktif dan inspiratif.

Berikut adalah penyusunan materi mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun secara mendalam dalam bentuk narasi komprehensif tanpa menggunakan poin-poin (bullet points), agar sesuai untuk kebutuhan penulisan artikel ilmiah atau jurnal:

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Penjaminan mutu merupakan pondasi utama dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas organisasi pendidikan. Gaspersz (2011) menjelaskan bahwa penjaminan mutu adalah serangkaian tindakan terencana serta terorganisir yang dirancang sedemikian rupa untuk memberikan keyakinan memadai bahwa produk atau layanan akan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam ranah pendidikan, Hendrovati (2016) mempertegas bahwa penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, otoritas lokal, hingga masyarakat dengan tujuan luhur untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Melalui perspektif para ahli ini, dapat dipahami bahwa penjaminan mutu pendidikan bukan sekadar formalitas, melainkan langkah-langkah terstruktur dan terarah yang bertujuan pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya, proses penjaminan mutu internal dimulai dengan tahapan pemetaan mutu sekolah yang sangat krusial. Secara nasional di Indonesia, pemetaan ini didukung oleh penggunaan aplikasi Laporan Penjaminan Mutu Pendidikan atau yang lebih dikenal sebagai Laporan PMP, sebuah platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data yang dihasilkan dari Laporan PMP ini berfungsi sebagai landasan utama bagi lembaga pendidikan dalam melakukan evaluasi diri dan menentukan arah perbaikan. Tren pendidikan tinggi di Eropa sendiri menunjukkan bahwa sistem "audit mutu" atau "audit institusional" menjadi kebijakan yang paling umum diterapkan. Penelitian oleh Corengia dkk. (2014) memberikan temuan menarik bahwa analisis peningkatan mutu yang lahir dari inisiatif internal memiliki dampak yang jauh lebih signifikan bagi institusi dibandingkan dengan tekanan atau dorongan yang berasal dari pihak eksternal.

Lebih lanjut, mekanisme kerja penjaminan mutu internal mencakup siklus perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berkelanjutan sebagaimana diungkapkan oleh Uchtiawati dan Zawawi (2014). Untuk memperkuat struktur organisasi, Al-Alawi et al. (2009) mengidentifikasi beberapa metode strategis seperti pembentukan badan atau Lembaga Penjaminan Mutu khusus, keterlibatan konsultan ahli, hingga analisis mendalam terhadap umpan balik dari para pemangku kepentingan. Pengelolaan dokumen juga menjadi kunci, di mana organisasi disarankan membangun sistem penyimpanan dokumen digital dan menyediakan templat standar untuk spesifikasi program serta evaluasi akhir agar seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan konsisten.

Berdasarkan pedoman internasional yang ditetapkan oleh ENQA (2009), sebuah institusi dianggap mencapai standar kualitas apabila mampu merumuskan kebijakan yang mendukung budaya mutu secara partisipatif. Hal ini melibatkan transparansi dalam penilaian mahasiswa, di mana kriteria evaluasi harus diinformasikan sejak awal. Selain itu, aspek sumber daya manusia menjadi komponen paling vital, sehingga lembaga wajib menerapkan manajemen staf pengajar yang berkelanjutan melalui dukungan motivasi dan imbalan yang layak. Institusi juga memikul tanggung jawab besar untuk menyediakan sumber belajar yang memadai, membangun sistem informasi yang efektif untuk manajemen kurikulum, serta menyajikan informasi publik yang akurat dan selalu diperbarui mengenai program pendidikan yang mereka tawarkan.

Pada akhirnya, keberhasilan sistem jaminan mutu internal ini sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program secara disiplin sesuai pandangan Puspitasari (2018). Kerja sama tim antar seluruh elemen di sekolah menjadi faktor penentu yang paling krusial dalam meningkatkan performa institusi secara keseluruhan (Praraksa dkk., 2015). Mengingat kompleksitas dan beragamnya pandangan para ahli mengenai kualitas, penjaminan mutu harus disikapi secara serius dengan dukungan penuh dari berbagai pihak demi membangun lembaga pendidikan yang memiliki budaya mutu yang kokoh dan berkelanjutan.

Penjaminan Mutu Eksternal

Cheng dan Tsui (2010) berpendapat bahwa penjaminan mutu eksternal adalah proses berbagi pengalaman dan membandingkannya dengan praktik terbaik. Penjaminan mutu eksternal terdiri dari serangkaian langkah untuk berbagi pengalaman dan membandingkannya dengan praktik pendidikan yang paling efektif. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan dukungan, saran, dan rekomendasi untuk mencapai keunggulan, relevansi, dan keberagaman. Untuk memastikan kelancaran proses ini dan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas badan penjaminan mutu bersama eksternal, mereka yang berpartisipasi sebagai evaluator harus memiliki pengetahuan ahli. Cheng (2015) menjelaskan keterampilan inti yang dibutuhkan oleh para profesional penjaminan mutu eksternal. Beberapa keterampilan yang diperoleh meliputi ketajaman profesional, kemampuan untuk melakukan tinjauan sistematis, analisis situasional, keterampilan manajemen, sensitivitas reflektif, dan keterampilan interpersonal.

Penjaminan Mutu Eksternal Cheng dan Tsui (2010) menjelaskan penjaminan mutu bersama eksternal sebagai proses berbagi pengalaman dan membandingkannya dengan praktik terbaik. Penjaminan mutu eksternal adalah proses yang melibatkan berbagi pengalaman dan membandingkannya dengan praktik pendidikan terbaik. Tujuan utama dari sistem penjaminan mutu kolaboratif eksternal adalah untuk memberikan dukungan, mengembangkan rekomendasi, dan memberikan saran untuk mencapai keunggulan, relevansi, dan keberagaman. Untuk memastikan kelancaran prosedur, akuntabilitas, dan integritas badan penjaminan mutu eksternal, mereka yang terlibat dalam proses ini (evaluator) harus memiliki kompetensi yang memadai. Cheng (2015) menguraikan beberapa kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh spesialis penjaminan mutu eksternal. Kompetensi ini meliputi profesionalisme, kemampuan untuk melakukan tinjauan sistematis, analisis situasional, keterampilan manajemen, refleksivitas, dan keterampilan interpersonal.

Sistem penjaminan mutu eksternal juga harus memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Setiap tahap proses ini bertujuan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan. Pelaporan dilakukan setelahnya. Laporan harus terstruktur dengan jelas agar mudah dipahami. Semua hasil dari sistem penjaminan mutu eksternal, termasuk rekomendasi, pujian, dan informasi lainnya, harus disajikan untuk tujuan evaluasi. Prosedur tindak lanjut juga telah ditetapkan. Rekomendasi untuk peningkatan kualitas harus disertai dengan prosedur tindak lanjut yang telah ditentukan dan diimplementasikan secara konsisten. Langkah selanjutnya adalah pemantauan rutin. Penjaminan mutu eksternal untuk lembaga dan program studi harus dilakukan secara teratur. Selanjutnya, dilakukan analisis sistemik yang komprehensif. Lembaga penjaminan mutu eksternal diharuskan untuk menyiapkan laporan ringkasan yang menjelaskan dan menganalisis hasil keseluruhan dari penilaian, pengujian, dan kegiatan lainnya (ENQA, 2009). Proses penjaminan mutu eksternal melibatkan pengembangan prosedur yang kemudian dipublikasikan atau dikomunikasikan kepada lembaga pendidikan. Penjaminan mutu eksternal juga mencakup penjaminan mutu internal di dalam lembaga pendidikan.

Akreditasi dan Standar Nasional/Internasional

Akreditasi dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengevaluasi mutu menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Akreditasi mencakup penilaian profesional untuk menjelaskan apakah suatu lembaga pendidikan memenuhi batasan yang sudah ditetapkan (Prados, 2005). Proses akreditasi dilaksanakan secara objektif untuk menilai seberapa baik suatu sekolah mematuhi dan menjalankan efektivitasnya. Sekolah dapat memberikan data yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Selain itu, sekolah juga dapat berusaha meningkatkan mutu pendidikan melalui penilaian kinerja serta akreditasi bagi sekolah yang siap menjalani proses ini (Hanun, 2015). Dengan melalui akreditasi, kualitas pendidikan bisa dijamin sesuai dengan standar pendidikan nasional dan bisa berfungsi sebagai pedoman untuk perbaikan mutu serta perencanaan pengembangan

sekolah. Pada dasarnya, akreditasi menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah, karena berfungsi untuk melindungi konsumen.

Novialiant (2012) menjelaskan UNESCO sebagai komisi pendidikan Internasional mengemukakan empat pilar pendidikan, yaitu Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Learning to know (belajar untuk mengetahui), artinya peserta didik belajar sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti. Learning to do (belajar dengan cara beraktfitas), artinya peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan latihan dan praktek. Tujuannya peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuannya dan memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Learning to be, artinya peserta didik dapat belajar menjadi diri sendiri dan mengetahui yang terbaik bagi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah learning to live together (belajar hidup bersama). Artinya peserta didik diajarkan untuk dapat hidup bersosialisasi dengan sesama, dengan cara saling memahami, menghormati (Delors, 1996). Dari sini, diharapkan peserta didik menjadi individu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi insan yang berakarakter dan berakhlak mulia yang mengerti tentang tugas dan tanggung jawab.

Penerapan akreditasi sekolah bertujuan untuk mengoptimalkan program yang tidak hanya mempromosikan akreditasi tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan yang ada (Utiarahman, 2017). Beberapa sekolah melakukan penilaian pasca-akreditasi dan berkomitmen untuk mempertahankan aspek yang ada dan meningkatkan program yang dianggap kurang optimal (Asopwan, 2018). Akreditasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat diimplementasikan jika para pemimpin program sekolah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah yang telah mencapai akreditasi program mereka tidak diragukan lagi berkembang berkat perencanaan yang cermat. Di sisi lain, implementasi akreditasi tidak selalu mudah, karena berbagai kendala muncul. Kendala umum meliputi persiapan yang tidak memadai, bukti fisik yang tidak memadai, pedoman yang tidak lengkap, dan lain-lain. Selain itu, keterbatasan waktu untuk penilaian diri dan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara individu dan tim juga merupakan tantangan (Sholihin, 2018). Peningkatan akreditasi sekolah sangat penting dan harus dilakukan setiap tahun. Sekolah perlu mempersiapkan diri secara menyeluruh untuk akreditasi, mulai dari tahap perencanaan hingga proses implementasi. Akreditasi memastikan berfungsinya semua program sekolah dengan baik (Novelia, 2019). Hal ini tercapai karena akreditasi merupakan cara efektif untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Proses akreditasi, yang dilakukan secara objektif untuk menilai kepatuhan dan efektivitas sekolah, dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan. Data ini sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Sekolah dapat berupaya meningkatkan kualitasnya berdasarkan hasil penilaian kinerja dan akreditasi (Hanoun, 2015).

Novella (2012) menjelaskan bahwa UNESCO, sebagai badan internasional yang fokus pada pendidikan, telah menetapkan empat pilar utama pendidikan: "Belajar untuk Mengetahui," "Belajar untuk Melakukan," "Belajar untuk Menjadi," dan "Belajar untuk Hidup Bersama." "Belajar untuk Mengetahui" mengisyaratkan bahwa siswa harus mempelajari materi yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka jalani. Sementara itu, "Belajar untuk Melakukan" (belajar melalui praktik) menunjukkan bahwa siswa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dengan cara bertindak dan mengalami langsung. Proses ini bertujuan untuk mengajarkan siswa cara menerapkan pengetahuan mereka dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. "Belajar untuk Menjadi" berarti siswa didorong untuk mengenali diri mereka sendiri dan memahami apa yang terbaik bagi diri mereka. Di sisi lain, "Belajar untuk Hidup Bersama" mengajarkan siswa untuk berkomunikasi dengan dasar saling pengertian dan rasa hormat (Delors, 1996). Dengan demikian, siswa diharapkan berkembang menjadi individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan di bidang sains dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan rasa tanggung jawab.

Dalam konteks ini, akreditasi dan standar pendidikan terkait erat dan saling memperkuat dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar pendidikan, baik nasional

maupun internasional, berfungsi sebagai pedoman atau tolok ukur untuk menilai kualitas suatu lembaga pendidikan, sedangkan akreditasi adalah proses penilaian terstruktur yang menentukan seberapa baik suatu lembaga memenuhi standar yang ada. Dengan demikian, standar memberikan pedoman dan kriteria yang jelas, sementara akreditasi berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian standar tersebut secara objektif dan bertanggung jawab. Tanpa standar yang jelas, proses akreditasi tidak memiliki landasan yang kokoh untuk evaluasi, dan tanpa akreditasi, mustahil untuk menilai keberhasilan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menggabungkan penerapan standar internasional dengan implementasi akreditasi sangat penting untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan daya saing lembaga pendidikan secara global, dan mempersiapkan lulusan yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan zaman.

Pendidikan Berbasis Outcome dan Dampak Sosial

Penerapan pendidikan berbasis hasil (*Outcome-Based Education*) tidak dapat dipisahkan dari peran kepemimpinan sekolah yang visioner dan manajemen kualitas yang strategis. Keberhasilan transisi menuju sistem yang berorientasi pada hasil sangat bergantung pada kemampuan pemimpin institusi untuk menyelaraskan kembali visi dan misi sekolah agar mendukung penuh fleksibilitas kurikulum. Heliani (2010) menegaskan bahwa langkah awal yang harus diambil oleh sekolah adalah membangun sistem pelaksanaan yang konsisten, di mana setiap kebijakan yang diambil mulai dari tingkat manajemen hingga instruksional di kelas harus bermuara pada pencapaian kompetensi siswa. Hal ini menuntut adanya keterbukaan organisasi terhadap perubahan dan kemauan untuk melakukan investasi jangka panjang pada pengembangan kapasitas tenaga pendidik agar mampu merancang metode pengajaran yang inovatif dan relevan dengan tren industri terkini.

Selain itu, penting untuk ditekankan bahwa kualitas pendidikan dalam kerangka akreditasi dan OBE bukanlah sebuah titik henti, melainkan sebuah proses perbaikan berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Sekolah yang hanya mengejar formalitas akreditasi cenderung akan mengalami penurunan mutu setelah penilaian selesai. Sebaliknya, institusi yang mengadopsi semangat standar internasional akan menjadikan hasil penilaian akreditasi sebagai cermin untuk melakukan evaluasi diri secara jujur. Data valid yang dihasilkan dari proses akreditasi menjadi instrumen navigasi bagi pengelola program untuk mengidentifikasi celah antara rencana dan realitas di lapangan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya mampu menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, tetapi juga membangun reputasi lembaga yang kredibel, akuntabel, dan memiliki daya tawar yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Dari perspektif sosial yang lebih luas, pendidikan yang berorientasi pada dampak nyata juga berfungsi sebagai alat transformasi budaya di lingkungan sekolah. Ketika nilai-nilai seperti tanggung jawab, kolaborasi, dan kemandirian ditekankan dalam setiap penilaian berbasis proyek, sekolah secara tidak langsung sedang menyemai benih-benih karakter unggul pada diri siswa. Dampaknya, masyarakat akan menerima lulusan yang tidak hanya siap bekerja secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan kemampuan komunikasi yang baik. Sinergi antara standar mutu yang ketat dan pendekatan pendidikan yang humanis inilah yang pada akhirnya akan memperkuat struktur sosial dan mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih maju, inovatif, dan beradab.

SIMPULAN

Mutu pendidikan merupakan sebuah konsep yang rumit dan selalu berubah, melibatkan semua elemen dalam proses pendidikan, mulai dari input dan proses hingga hasil serta dampaknya. Beragam faktor, seperti tenaga pengajar, kurikulum, kepemimpinan, mahasiswa, dan jaringan dukungan, ikut berkontribusi dalam menentukan kualitas ini. Untuk menjaga kualitas tersebut, sistem jaminan mutu, baik dari dalam maupun luar, memiliki peranan yang sangat krusial. Sistem ini dijalankan dengan cara yang teratur dan berkelanjutan, melibatkan banyak pihak demi mencapai standar yang telah ditentukan.

Akreditasi dan standar, baik di tingkat nasional maupun internasional, sangat berkontribusi dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas institusi pendidikan serta memperkuat daya saing di tingkat global. Selain itu, penerapan Pendidikan Berbasis Hasil (Outcome-Based Education/OBE) menekankan pada pencapaian keahlian nyata oleh para siswa, sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Secara keseluruhan, penggabungan kualitas pendidikan, sistem jaminan mutu, akreditasi, dan pendekatan OBE memiliki pengaruh sosial yang besar, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka pengangguran, serta menciptakan masyarakat yang lebih kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan harus dilakukan dengan cara yang menyeluruh, bukan secara sembarangan, dengan mengadopsi pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan yang mencakup kebijakan pendidikan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, pengajar, dan komunitas, memiliki peranan penting dalam membangun budaya kualitas yang berkelanjutan. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global dan tuntutan zaman merupakan kunci untuk memastikan sistem pendidikan tetap relevan dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas serta kompetitif. Oleh sebab itu, sangat penting untuk terus memperkuat kerjasama antara standar, akreditasi, jaminan mutu, dan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi ke depan sebagai dasar dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan visioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alawi, Y., Al-Kaabi, D., Rashdan, S., & Al-Khaleefa, L. (2009). Quality Assurance and Continuous Improvement: A Case Study of The University of Bahrain. *Quality in Higher Education*, 15(1), 61–69.
- Aminatul Zahro, 2014, *Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Asopwan, D. (2018). Studi Tentang Akreditasi dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah. *Indonesian Journal of Education Management and Administration*, 2 (2)
- Awaludin, A. A. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2 (1)
- Bagenda, E. C., Hasnawati, C., Annova, F., Azizah, K., Nursaeni, M., Asdiana, R.. A., & Shobri, M. (2022). Metode penelitian kepustakaan (Library research). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Cheung, J. C. M. (2015). Professionalism, Profession and Quality Assurance Practitioners in External Quality Assurance Agencies in Higher Education. *Quality in Higher Education*, 21(2), 151–170.
- Corengia, Á., Del Bello, J. C., Pita Carranza, M., & Adrogué, C. (2014). Quality Assurance Systems of Higher Education - The Case of European Institutions: Origin, Evolution and Trends. *Revista Gestao Universitaria Na America Latina - GUAL*, 7(3), 61–76.
- Hanun, F. (2015). Akreditasi Madrasah sebagai Kunci Keberhasilan dalam Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 13 (1)
- Karyanto, U. G. & Rahman, A. (2015). Implikasi Akreditasi Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Tata Kelola SMK Negeri 1 Oku. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 7 (2)
- Marus Suti, 2011, "Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan", *MEDTEK*, Vol. 3 No. 2, Oktober, hal. 2
- Novaliant, W. (2012). Implementasi Pendekatan Empat Pilar Pendidikan UNESCO Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X di MAN Rejosari Madiun. digilib.uinsby.ac.id/9663/5/bab2.pdf.
- Novelia I., Azwar, & Elfitra. (2019). Langkah Progresif Peningkatan Akreditasi Sekolah: Studi SMP di Kota Padang. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4 (2)
- Nujumuddin. (2019). Dampa

- Prados, J.W., Peterson, G.D., & Lattuca, L.R. (2005). Quality Assurance of Engineering through Accreditation The Impact Of Engineering Criteria 2000 and its Global Influence. *Journal of Engineering Education*, 94(1)
- Praraksa, P., Sroinam, S., Inthusamith, M., & Pawarinyanon, M. (2015). Model of Factors Influencing Internal Quality Assurance Operational Effectiveness of the Small Sized Primary Schools in Northeast Thailand. *Social and Behavioral Sciences*, 197: 1586-1590.
- Puspitasari, H. (2018). Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem penjaminan Mutu Internal di Sekolah. *Muslim Heritage*, 1: 339-368.
- Sholihin, E. N. C., Bafadal, I., & Sunandar, A. (2018,). Pengelolaan Persiapan Akreditasi Sekolah. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1 (2)
- Suryana, A. (2005). Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan
- Utiahman, P. (2017). Manajemen Program Akreditasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Boalemo. *Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 2 (1)